

Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Lisu Massikola Paimeng (Gemar Limas) di Kabupaten Bone

Andi Reza Zulkarnain, Rahmatullah, Ashar Prawitno

Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin

Email: zulkarnain1560@gmail.com, rahmatullah.jafar@yahoo.com,
asharprawitno@unhas.ac.id

Abstract

In Bone Regency, the ability of villages to report data on out-of-school children into the data collection system remains a significant challenge. The collaborative issues that emerged among stakeholders in the implementation of the Gemar Limas (Gerakan Masyarakat Lisu Massikola Paimeng) Program in Bone Regency indicate inefficiencies and ineffectiveness in coordination and communication. This study aims to analyze the collaborative governance involving the Regional Development Planning Agency (Bappeda), the Department of Education, the Department of Women's Empowerment and Child Protection, Community Learning Activity Centers (PKBM), and Women's Empowerment Organizations. The analysis focuses on face-to-face dialogue, commitment to the process, and the outcomes achieved through the implementation of the program in Bone Regency. This study employed a qualitative descriptive research method to provide an objective description and explanation of the actual roles of the Regional Development Planning Agency, the Department of Education, the Department of Women's Empowerment and Child Protection, Community Learning Activity Centers, and Women's Empowerment Organizations in fulfilling children's right to education and addressing the issue of out-of-school children through the Gemar Limas Program. The results of the study indicate that face-to-face dialogue led by the Regional Development Planning Agency plays a crucial role in ensuring that each institution performs its responsibilities in accordance with the Regional Action Plan (RAD) and establishes specific targets during coordination meetings. Commitment to the process demonstrated by each institution is based on the principle of "No One Left Behind," ensuring that children's participation is continuously supported throughout the program implementation. The outcomes achieved show that more than 39,000 children were involved in the program between 2017 and 2023. The program also received recognition as one of the Top 99 Public Service Innovation (KIPP) nominees for its innovative contribution and has been adopted at both provincial and national levels.

Keywords: *Gemar Limas; Collaborative Governance; Out-of-School Children.*

Abstrak

Di Kabupaten Bone, akses desa untuk melaporkan data anak tidak sekolah ke sistem pendataan masih menjadi tantangan besar. Permasalahan kolaborasi yang terjadi antara pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program Gerakan Masyarakat Lisu Massikola Paimeng di Kabupaten Bone menunjukkan adanya ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam koordinasi dan komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis collaborative governance antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan yang ditinjau dari Dialog tatap muka, Komitmen terhadap proses, dan Hasil akhir yang dicapai dari pelaksanaan program di Kabupaten Bone. Metode Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dalam pemenuhan hak pendidikan dan penanganan anak tidak sekolah melalui program Gemar Limas. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa

Dialog tatap muka yang dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sangat vital dalam memastikan setiap instansi terlibat menjalankan peran sesuai dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan menetapkan target-target pada saat pertemuan koordinasi. Komitmen terhadap proses yang dilakukan oleh tiap instansi menggunakan pendekatan yang berdasar pada prinsip No one left behind sehingga partisipasi anak selama program berlangsung terus didukung. Hasil akhir yang dicapai menunjukkan keterlibatan lebih dari 39.000 anak dari tahun 2017-2023, meraih nominasi Inovasi KIPP top 99 atas kontribusinya yang inovatif, dan program Gemar Limas diadopsi ditingkat provinsi dan nasional..

Kata kunci: *Gemar Limas, Collaborative Governance, Anak tidak sekolah*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar warga negara dan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas manusia. Jaminan tersebut ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, pemenuhan hak pendidikan tidak hanya bergantung pada ketersediaan sekolah, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menjangkau anak yang berada di luar sistem pendidikan. Masalah anak tidak sekolah merupakan persoalan multidimensional yang berkaitan dengan kondisi ekonomi rumah tangga, akses, lingkungan sosial, karakteristik individu, dan kapasitas pemerintah menyediakan intervensi yang tepat. Kajian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal secara bersama-sama memengaruhi risiko putus sekolah (Purba & Ekaria, 2023; Halid, 2022).

Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan juga ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan ketentuan wajib belajar. Dasar normatif tersebut menempatkan pemerintah pusat dan daerah sebagai aktor penting dalam memastikan akses pendidikan yang demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif. Tantangan kebijakan bukan hanya menyediakan layanan formal, tetapi juga membangun mekanisme penjangkauan bagi anak yang telah keluar atau belum masuk sekolah. Pendidikan nonformal karena itu menjadi salah satu jalur penting untuk memperluas kesempatan belajar dan

memberi alternatif bagi kelompok yang tidak terlayani secara optimal oleh pendidikan formal (Priambodo et al., 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar menjadi salah satu dasar normatif penyelenggaraan pendidikan dasar. Dalam konteks anak tidak sekolah, pendidikan formal dan nonformal perlu ditempatkan sebagai jalur yang saling melengkapi. PKBM mempunyai posisi strategis karena dapat menyediakan pendidikan kesetaraan dan layanan belajar yang lebih fleksibel. Kajian mengenai pendidikan nonformal menunjukkan bahwa efektivitas PKBM dipengaruhi oleh tata kelola, kapasitas tutor, kemitraan, kesesuaian program dengan kebutuhan warga belajar, serta dukungan kelembagaan (Syamsuri et al., 2024; Gea et al., 2024).

Data KPPPA dan BPS yang digunakan dalam naskah menunjukkan bahwa persoalan anak tidak sekolah masih signifikan, terutama pada kelompok usia dan wilayah tertentu. Pada 2022, angka putus sekolah yang dicantumkan dalam penelitian mencapai 1,38% pada jenjang SMA, 1,06% pada SMP, dan 0,13% pada SD. Data BPS Sulawesi Selatan tahun 2020 yang digunakan penulis juga mencatat 163.940 anak usia 7-18 tahun tidak bersekolah. Di Kabupaten Bone, dokumen program mencatat lebih dari 52 ribu anak usia 7-24 tahun belum menyelesaikan pendidikan dasar pada periode awal intervensi. Data tersebut perlu dipahami sebagai dasar penargetan kebijakan, karena kualitas pendataan sangat menentukan kemampuan pemerintah mengidentifikasi kelompok sasaran. Kajian terbaru tentang anak tidak

sekolah di Indonesia juga menekankan pentingnya estimasi dan data pada tingkat wilayah yang lebih rinci untuk mendukung intervensi yang tepat sasaran (Elieze et al., 2024).

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone menginisiasi Gerakan Masyarakat Lisu Massikola Paimeng (Gemar Limas) sejak 2017 untuk mengembalikan ATS ke jalur pendidikan. Program ini melibatkan perangkat daerah, pemerintah desa, PKBM, organisasi masyarakat, dan mitra pembangunan. Keterlibatan banyak aktor membuat keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh satu organisasi, tetapi oleh kemampuan membangun koordinasi, pembagian peran, pertukaran data, dan komitmen bersama. Penelitian mengenai layanan pendidikan dasar di Indonesia menunjukkan bahwa collaborative governance relevan ketika penyelesaian masalah membutuhkan interaksi lintas pemerintah dan nonpemerintah (Mawar et al., 2021).

Penelitian ini menggunakan kerangka collaborative governance Ansell dan Gash (2008) sebagai landasan utama. Collaborative governance dipahami sebagai proses yang mempertemukan aktor publik dan nonpublik dalam forum bersama untuk membangun keputusan dan tindakan kolektif. Dalam model tersebut, dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan capaian antara merupakan unsur yang saling berhubungan (Ansell & Gash, 2008). Literatur mutakhir menegaskan bahwa kolaborasi membutuhkan komunikasi multi-arah, kepemimpinan, konsensus, dan pembagian sumber daya agar tidak berhenti pada koordinasi formal (Saleh et al., 2021). Berdasarkan kebutuhan empiris penelitian, analisis difokuskan pada tiga aspek yang paling menonjol dalam pelaksanaan Gemar Limas, yaitu dialog tatap muka, komitmen terhadap proses, dan hasil yang dicapai.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami proses collaborative governance dalam pelaksanaan Gemar Limas. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya menjelaskan peran, interaksi, pengalaman, dan praktik koordinasi para aktor berdasarkan konteks pelaksanaan program. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menginterpretasikan fenomena melalui data wawancara, observasi, dan dokumen secara kontekstual (Fadli, 2021).

Penelitian dilaksanakan pada 27 Mei sampai 15 Juli 2024 di Kabupaten Bone. Lokasi penelitian mencakup Bappeda Kabupaten Bone, Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, DP3A Kabupaten Bone, LPP Bone, serta PKBM Mawar, PKBM Gema, dan PKBM Mallimongeng. Pemilihan lokasi mengikuti karakter program yang bersifat lintas lembaga sehingga informasi perlu diperoleh dari aktor yang memiliki fungsi berbeda dalam perencanaan, pendataan, advokasi, pembelajaran, dan pendampingan ATS.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Gemar Limas, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen program, data pemerintah, arsip, publikasi, dan literatur yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Data kemudian diorganisasi dan diinterpretasikan berdasarkan fokus penelitian, yaitu dialog tatap muka, komitmen terhadap proses, dan hasil yang dicapai. Karena penelitian bersifat kualitatif, temuan digunakan untuk menjelaskan proses dan hubungan antaraktor, bukan untuk menguji hubungan kausal secara statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian memfokuskan analisis pada collaborative governance dalam pelaksanaan Program Gemar Limas di Kabupaten Bone. Tiga aspek yang digunakan adalah dialog tatap muka, komitmen terhadap proses, dan hasil yang dicapai. Fokus tersebut mempertahankan kerangka empiris penelitian sekaligus menempatkan temuan dalam literatur collaborative governance yang menekankan pentingnya komunikasi, kepercayaan, pembagian peran, kepemimpinan fasilitatif, dan konsistensi keterlibatan aktor. Studi kolaborasi di Indonesia menunjukkan bahwa lemahnya dialog, ketidakjelasan peran, dan perbedaan kepentingan dapat mengurangi efektivitas proses kolaboratif (Sartika, 2024).

Dialog tatap muka

Dialog tatap muka merupakan ruang penting bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan informasi, menyamakan persepsi, merumuskan target, dan menyelesaikan perbedaan. Dalam collaborative governance, dialog tidak hanya berfungsi sebagai pertemuan administratif, tetapi sebagai proses membangun kepercayaan dan pemahaman bersama. Penelitian mengenai kolaborasi pada kebijakan pendidikan juga menunjukkan bahwa keterlibatan aktor nonpemerintah dan komunikasi antarpihak diperlukan agar kebijakan dapat diterapkan secara lebih efektif (Tati & Fatmawati, 2021).

Pemerintah Kabupaten Bone menetapkan Keputusan Bupati Bone Nomor 560 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten Bone Tahun 2020-2023. Dalam pengaturan tersebut, Bappeda Bone berperan sebagai project leader yang mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Temuan penelitian menunjukkan bahwa posisi Bappeda sebagai leading sector membantu

memastikan keterlibatan instansi sesuai Rencana Aksi Daerah (RAD). Secara analitis, kejelasan koordinator penting karena kolaborasi lintas organisasi membutuhkan aktor yang mampu memfasilitasi pertemuan, menjaga arah bersama, dan menghubungkan sumber daya antarinstansi. Studi collaborative governance di Indonesia menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif dan aturan dasar yang jelas dapat menjadi faktor pendukung proses kolaborasi (Islamy & Andriani, 2022).

Pada tahap awal, Bappeda bersama Sekretariat Daerah melaksanakan dialog tatap muka dan rapat koordinasi untuk membahas Gemar Limas serta menyatukan pemahaman mitra. Bappeda juga mengundang PKBM yang menjadi bagian dari pelaksanaan awal program untuk memperoleh pengarahan. Sekretariat Daerah memfasilitasi koordinasi dengan mengundang perangkat daerah dan mitra terkait guna memperjelas tugas masing-masing. Temuan ini menunjukkan bahwa forum koordinasi berfungsi sebagai mekanisme penyaluran peran. Namun, efektivitas dialog perlu dinilai dari tindak lanjutnya, terutama konsistensi pertukaran data dan penyelesaian kendala di tingkat desa. Literatur menunjukkan bahwa dialog yang intensif perlu diikuti kepercayaan, kesepahaman, dan mekanisme partisipasi yang berkelanjutan (Dhini & Bintari, 2023).

Dinas Pendidikan berfokus pada penyediaan jalur pembelajaran formal dan nonformal, termasuk mengarahkan ATS ke sekolah atau PKBM sesuai kebutuhan. PKBM menjadi ruang pendidikan kesetaraan sekaligus mitra pendataan bersama kader desa dan penilik kesetaraan. Fungsi pendidikan nonformal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara substantif, keberadaan PKBM penting karena ATS memiliki latar belakang dan hambatan yang beragam sehingga memerlukan pilihan belajar yang fleksibel. Penelitian tentang faktor putus sekolah menunjukkan bahwa

persoalan ekonomi, keluarga, motivasi, dan lingkungan dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan (Andini et al., 2024).

DP3A berperan dalam advokasi agar ATS memperoleh perhatian dalam pemenuhan hak anak. LPP Bone, dengan dukungan UNICEF Indonesia sebagaimana tercatat dalam dokumen program, terlibat dalam advokasi, pendataan, pelatihan tutor PKBM, dan rekonfirmasi data untuk mendukung anak kembali bersekolah. Kolaborasi ini memperlihatkan pembagian fungsi antara pemerintah dan organisasi nonpemerintah. Dalam collaborative governance, pembagian peran seperti ini dapat memperluas kapasitas program apabila tujuan, tanggung jawab, data, dan sumber daya dikelola secara transparan dan terkoordinasi (Asropi et al., 2022).

Komitmen Terhadap Proses
Komitmen terhadap proses menggambarkan kesediaan para aktor untuk mempertahankan keterlibatan, mengalokasikan waktu dan sumber daya, serta melaksanakan keputusan bersama. Komitmen tidak cukup ditunjukkan melalui kehadiran dalam rapat, tetapi perlu terlihat pada konsistensi pelaksanaan tugas, pertukaran informasi, dan tindak lanjut. Kajian collaborative governance menunjukkan bahwa komitmen berkembang ketika aktor memahami ketergantungan antarpihak dan melihat proses kolaborasi sebagai sarana mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai sendiri (Dhini & Bintari, 2023).

Pemerintah Kabupaten Bone melakukan berbagai komitmen dalam mengimplementasikan program Gemar Limas, salah satu langkah konkretnya adalah mengeluarkan Keputusan Bupati Bone Nomor 430 Tahun 2020 Tentang Pengembalian Anak dan Remaja Bersekolah melalui Program Gerakan Kembali Bersekolah tahun Pelajaran 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

Keputusan Bupati Bone yang menjadi dasar pengembalian anak dan remaja

bersekolah menunjukkan adanya dukungan formal pemerintah daerah. Dukungan regulasi penting untuk memberikan legitimasi dan memperjelas tanggung jawab, tetapi keberlanjutan program tetap bergantung pada kapasitas organisasi dan konsistensi implementasi. Temuan penelitian juga menunjukkan adanya perubahan peran Bappeda dari project lead menuju fungsi pendukung yang lebih menekankan optimalisasi data dan sumber daya desa. Pergeseran ini perlu disertai mekanisme transisi yang jelas agar koordinasi tidak melemah ketika kepemimpinan program berpindah.

Kepemimpinan program selanjutnya diarahkan kepada Dinas Pendidikan sesuai fungsi sektoralnya. Bappeda tetap mendorong optimalisasi identifikasi ATS melalui operator Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM), sedangkan Dinas Pendidikan mengalokasikan tanggung jawab kepada unit terkait, menyediakan dukungan bagi ATS, serta melibatkan pendidik, pemerintah desa, PKBM, dan perangkat lain dalam pendataan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas data merupakan bagian dari komitmen kolaborasi. Tanpa data yang konsisten dan dapat diperbarui, pembagian target dan evaluasi keberhasilan program akan sulit dilakukan secara akurat. Penguatan data tingkat lokal juga penting karena persoalan ATS berbeda antarwilayah (Elieze et al., 2024).

PKBM Mawar, Gema, dan Mallimongeng menunjukkan komitmen melalui keterlibatan tutor dalam pelatihan yang difasilitasi LPP Bone dan UNICEF dengan menggunakan Modul Kit Remaja. Pelatihan tersebut diarahkan untuk memperkuat pendekatan pembelajaran dan keterampilan tutor. Dalam pendidikan nonformal, peningkatan kapasitas pengelola dan tutor penting karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh akses, tetapi juga oleh kualitas pengalaman belajar dan kemampuan lembaga

mempertahankan partisipasi warga belajar (Syamsuri et al., 2024).

Gambar 1. Pelatihan Modul Lingkaran Remaja



Sumber: Lembaga Pemberdayaan Perempuan Bone

Gambar diatas merupakan proses pengembangan kapasitas tutor PKBM dan fasilitator lingkaran remaja yang diselenggarakan oleh LPP Bone dan UNICEF. Peserta pelatihan tersebut diberikan ilmu mengenai penggunaan modul sebagai bahan ajar yang menyenangkan di PKBM yang mampu meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar. Sedangkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menegaskan komitmen dan konsistensi mereka dalam penguatan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat). Lebih lanjut, dari sisi Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone mereka memperjuangkan pendidikan anak-anak hingga tingkat kuliah, mengembangkan lingkaran remaja menggunakan modul kit remaja bersama PKBM, dan meningkatkan keterampilan melalui labskill yang mendukung anak-anak untuk berusaha meningkatkan ekonomi mereka. Monitoring dengan rapid pro melibatkan sekolah dan desa untuk mengetahui kehadiran anak-anak dan mendekati mereka yang rentan berhenti sekolah kembali.

Tabel 1. Jumlah Peserta Didik PKBM di Kab.Bone Tahun Ajaran 2023-2024

No	Kecamatan	Jumlah Peserta Didik
----	-----------	----------------------

1.	Ajangale	210
2.	Awangpone	290
3.	Barebbo	447
4.	Bontocani	117
5.	Lamuru	334
6.	Lappariaja	451
7.	Libureng	80
8..	Mare	152
9.	Patimpeng	430
10.	Ponre	30
11.	Salomekko	89
12.	Sibulue	244
13.	Tanete Riattang	1225
14.	Tanete Riattang Timur	1021
15.	Tellusiattinge	1592
16.	Tonra	140
17.	Ulaweng	800
TOTAL		7682

Sumber : Data Pokok Pendidikan Kemendikbud Tahun 2024

Tabel 1 menunjukkan terdapat 7.682 peserta didik PKBM pada 17 kecamatan di Kabupaten Bone tahun ajaran 2023-2024. Jumlah tertinggi tercatat di Tellusiattinge (1.592 peserta didik), Tanete Riattang (1.225), dan Tanete Riattang Timur (1.021), sedangkan jumlah terendah tercatat di Ponre (30). Perbedaan tersebut menggambarkan variasi pemanfaatan layanan pendidikan nonformal antarwilayah. Data ini tidak secara langsung menunjukkan jumlah ATS yang berhasil dikembalikan melalui Gemar Limas, tetapi memperlihatkan kapasitas PKBM sebagai salah satu jalur pendidikan alternatif. Karena itu, data peserta PKBM sebaiknya dibaca bersama data individu ATS, status reintegrasi, dan keberlanjutan kehadiran untuk menilai hasil program secara lebih tepat.

PKBM Gema, Mawar, Mallimongeng, dan Cumpiga dalam temuan penelitian melakukan pendekatan kepada anak dan keluarga, pendataan, serta pengembangan keterampilan. Dukungan Dana Desa pada

lokasi tertentu juga memperkuat pelaksanaan program. Kemitraan PKBM dengan pemerintah dan masyarakat merupakan unsur penting dalam tata kelola pendidikan nonformal; studi mengenai jaringan kemitraan PKBM menunjukkan bahwa hubungan antarlembaga dapat memperluas sumber daya, akses, dan keberlanjutan layanan (Gea et al., 2024).

Gambar 2. Anggaran Pelaksanaan Gemar Limas di Cumpiga

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)				
PEMERINTAH DESA CUMPIGA KECAMATAN AWANGPONE				
TAHUN ANGGARAN 2021				
Bidang	: 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
Sub Bidang	: 2.1. Sub Bidang Pendidikan			
Kegiatan	: 2.1.10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi			
Waktu Pelaksanaan	: 12 Bulan			
Output/Keluaran	: Terbayarnya Uang Saku Peserta didik			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			7.100.000,00
5.01.10	01. Gerakan Masyarakat (Lau Masyarakat) (GEMAR/LIMAS)			7.100.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			7.100.000,00
5.2.7.04.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin			7.100.000,00
	01. Uang Saku Untuk di Tingkat SD/ Sederajat 6 Org	DDS	6 Org	300.000,00
	02. Uang Saku Untuk di Tingkat SMP/ Sederajat 5 Orang	DDS	5 Org	500.000,00
	03. Uang Saku untuk Ditingkat SMA/ Sederajat 4 Orang	DDS	4 Orang	700.000,00
	JUMLAH (Rp)			7.100.000,00
Disetujui, Kepala Desa Cumpiga		Telah Diperiksalai Sekretaris Desa Cumpiga		Cumpiga, 29 Desember 2020 Pemerintah Desa Cumpiga
ANDI PADALING, S.Pd		ANDI MUSTAFAH		

Sumber : Pemerintah Desa Cumpiga 2021

Gambar 2 menunjukkan dukungan Pemerintah Desa Cumpiga melalui alokasi anggaran desa untuk pelaksanaan Gemar Limas. PKBM melakukan pendekatan kepada orang tua dan anak, mendata ATS, kemudian mendiskusikan pilihan jalur pendidikan formal atau nonformal. Dukungan pemerintah desa memperlihatkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya berada pada tingkat kabupaten. Namun, temuan penelitian mengenai masih terbatasnya akses desa dalam pelaporan data menunjukkan bahwa desentralisasi pelaksanaan perlu diikuti peningkatan kapasitas operator, prosedur pelaporan yang

sederhana, dan umpan balik data dari kabupaten kepada desa.

Hasil akhir yang dicapai

Hasil akhir dalam collaborative governance perlu dibedakan antara output, outcome, dan dampak. Output dapat berupa jumlah pertemuan, peserta, atau anak yang dijangkau; outcome berkaitan dengan perubahan status pendidikan dan keberlanjutan partisipasi; sedangkan klaim dampak memerlukan bukti yang lebih kuat untuk menghubungkan perubahan secara kausal dengan program. Karena penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif, hasil Gemar Limas dianalisis sebagai capaian program dan perubahan yang berjalan searah dengan tujuan kolaborasi, bukan sebagai bukti kausal tunggal atas perubahan indikator pembangunan.

Catatan Bappeda Kabupaten Bone yang digunakan dalam penelitian menunjukkan bahwa sekitar 39.000 anak terlibat dalam upaya kembali ke jalur pendidikan selama periode 2017-2023. Gemar Limas juga memperoleh nominasi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Capaian tersebut menunjukkan pengakuan terhadap inovasi program dan kemampuan kolaborasi menjangkau sasaran dalam skala besar. Namun, keberhasilan collaborative governance tidak hanya ditentukan oleh penghargaan atau jumlah peserta, tetapi juga oleh kemampuan mempertahankan koordinasi, kualitas layanan, dan keberlanjutan anak dalam pendidikan. Studi kolaborasi sektor publik menunjukkan bahwa proses yang diwajibkan secara kelembagaan tetap dapat mengalami perubahan intensitas dan kualitas ketika kepemimpinan, insentif, atau hubungan antaraktor berubah (Kurniasih et al., 2023).

Hasil akhir yang dicapai

Hasil akhir dalam collaborative governance perlu dibedakan antara output, outcome, dan dampak. Output dapat berupa jumlah pertemuan, peserta, atau anak yang

dijangkau; outcome berkaitan dengan perubahan status pendidikan dan keberlanjutan partisipasi; sedangkan klaim dampak memerlukan bukti yang lebih kuat untuk menghubungkan perubahan secara kausal dengan program. Karena penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif, hasil Gemar Limas dianalisis sebagai capaian program dan perubahan yang berjalan searah dengan tujuan kolaborasi, bukan sebagai bukti kausal tunggal atas perubahan indikator pembangunan.

Catatan Bappeda Kabupaten Bone yang digunakan dalam penelitian menunjukkan bahwa sekitar 39.000 anak terlibat dalam upaya kembali ke jalur pendidikan selama periode 2017-2023. Gemar Limas juga memperoleh nominasi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Capaian tersebut menunjukkan pengakuan terhadap inovasi program dan kemampuan kolaborasi menjangkau sasaran dalam skala besar. Namun, keberhasilan collaborative governance tidak hanya ditentukan oleh penghargaan atau jumlah peserta, tetapi juga oleh kemampuan mempertahankan koordinasi, kualitas layanan, dan keberlanjutan anak dalam pendidikan. Studi kolaborasi sektor publik menunjukkan bahwa proses yang diwajibkan secara kelembagaan tetap dapat mengalami perubahan intensitas dan kualitas ketika kepemimpinan, insentif, atau hubungan antaraktor berubah (Kurniasih et al., 2023).

Gambar 3. Capaian Program Gemar Limas Sebelum dan Setelah Inovasi

capaian sebelum dan setelah inovasi						
NO	URAIAN	Sebelum inovasi (orang)	Setelah inovasi			
		2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah Anak Tidak Sekolah usia 7-18 tahun	54.000	52.976	51.952	50.254	49.214
1	Kasus Perkawinan Anak	4.642	3.750	2.840	2.649	2.097
3	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS	84,37	84,56	85,12	100,27	101,98
	Angka Partisipasi kasar SMA/MA/SMK	70,59	71,32	82,08	91,54	94,02
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	63,86	64,16	65,04	65,67	66,06
5	Rata-rata lama Sekolah (RLS)	6,76	6,77	6,97	6,98	7,15
7	Angka melek Huruf (AMH)	87,87	87,88	89,98	91,09	93,25

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Bone 2021

Data Bappeda Kabupaten Bone yang digunakan dalam penelitian mencatat 52.976 anak dan remaja usia 7-24 tahun belum menyelesaikan pendidikan pada kondisi awal yang menjadi rujukan program, dan pada 2023 jumlah yang dicatat menjadi 13.850. Dokumen yang sama memuat kelompok usia 7-12 tahun sebanyak 1.609 anak, usia 13-15 tahun sebanyak 4.211 anak, dan usia 16-17 tahun sebanyak 10.650 anak pada salah satu periode pendataan. Penurunan angka administratif tersebut berjalan searah dengan tujuan Gemar Limas, tetapi perlu ditafsirkan dengan mempertimbangkan perubahan basis data, mekanisme verifikasi, perpindahan status pendidikan, dan periode pencatatan. Partisipasi PKBM melalui pendekatan learning by doing dan playing menjadi salah satu dukungan dalam menyediakan pengalaman belajar alternatif bagi anak yang kembali ke pendidikan.

DP3A Kabupaten Bone berkontribusi melalui advokasi pemenuhan hak anak serta penguatan keterampilan yang mendukung reintegrasi pendidikan. Dalam kerangka kolaborasi, peran tersebut melengkapi fungsi Dinas Pendidikan dan PKBM. Pendekatan lintas sektor penting karena penyebab anak tidak sekolah tidak bersifat tunggal. Kajian mengenai risiko putus sekolah di Indonesia menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan perubahan lingkungan belajar dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan, sehingga intervensi membutuhkan dukungan yang melampaui aspek akademik semata (Muzayyin & Handayani, 2023).

Gambar 4. Capaian Indikator tahun 2019-2023



KABUPATEN BONE

PEMERINTAH PROVINSI

SULAWESI SELATAN



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Demokrasi	%	-	-	-	-	-
2	Anak Tidak Sekolah (ATS)	Anak	52.976	43.354	8.909	17.778	13.850
3	Inflasi	%	1,64	1,89	2,26	5,52	2,84
4	PMDB (ADHBB)	Juta Rupiah	36.034.839,17	36.560.640,40	39.369.680,42	43.640.844,00	46.935.170,81
5	PMDB Per Kapita	Juta/Kapita/Tahun	47,81	45,68	48,67	53,48	57,02
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,01	-0,25	5,53	5,23	3,77
7	Tingkat Kemiskinan	%	10,06	10,68	10,52	10,58	10,53
8	Indeks Gini Rasio	Poin	0,366	0,404	0,383	0,376	0,389
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,01	3,20	4,15	2,27	2,88
10	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	65,67	66,06	66,40	67,01	73,20
11	Prevalensi Stunting	%	40,1	37,0	34,1	27,8	26,0
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	36,72 C	43,72 C	56,77 CC	59,54 CC	56,92 CC
13	Nilai SAKIP	Poin	60,03 B	63,42 B	66,04 B	67,35 B	B
14	Indeks SPBE	Poin	-	-	-	-	-

Sumber : BAPPEDA Kab. Bone tahun 2023

Secara Keseluruhan penelitian menunjukkan bahwa Gemar Limas menghasilkan capaian penting dalam penjangkauan ATS dan penguatan akses pendidikan formal maupun nonformal. Pada periode yang sama, IPM Kabupaten Bone dalam naskah tercatat meningkat dari 66,2 pada 2020 menjadi 67,5 pada 2022. Peningkatan tersebut berjalan searah dengan perbaikan indikator pembangunan, tetapi penelitian ini tidak dirancang untuk membuktikan bahwa perubahan IPM disebabkan secara langsung oleh Gemar Limas. Kontribusi program lebih tepat dipahami melalui mekanisme peningkatan akses pendidikan, reintegrasi ATS, dan penguatan jejaring layanan pendidikan.

Temuan juga menunjukkan perubahan pada cara pemerintah, PKBM, organisasi masyarakat, dan keluarga menangani ATS melalui pendataan, penjangkauan, pilihan pendidikan kesetaraan, serta dukungan keterampilan. Capaian ini penting karena penanganan anak putus sekolah memerlukan strategi yang tidak hanya mengembalikan anak ke ruang belajar, tetapi juga mengurangi risiko mereka keluar kembali. Penelitian mengenai implementasi program penurunan putus sekolah menunjukkan bahwa dukungan sumber daya, komunikasi, dan konsistensi pelaksanaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan intervensi (Priambodo et al., 2022).

Nominasi Top 99 KIPP dan adopsi pendekatan Gemar Limas di tingkat yang lebih luas memperlihatkan nilai inovatif program. Namun, temuan penelitian juga mencatat resistensi di sebagian desa, keterbatasan pelaporan data, serta tantangan menjaga kualitas dan konsistensi implementasi. Dengan demikian, agenda berikutnya bukan hanya memperluas replikasi, tetapi memastikan bahwa mekanisme kolaborasi telah terlembagakan. Literatur collaborative governance menunjukkan bahwa keberlanjutan kolaborasi membutuhkan kejelasan peran, komunikasi yang terus berlangsung, kapasitas aktor, dan mekanisme akuntabilitas bersama (Afandi, 2022). Pengalaman kolaborasi pada sektor kebijakan lain juga menunjukkan bahwa pelembagaan forum dan akuntabilitas bersama penting untuk menjaga kesinambungan tindakan kolektif (Apriliani et al., 2023; Ramadhani et al., 2024).

KESIMPULAN

Pelaksanaan collaborative governance dalam Program Gerakan Masyarakat Lisu Massikola Paimeng (Gemar Limas) di Kabupaten Bone telah melibatkan Bappeda, Dinas Pendidikan, DP3A, PKBM, LPP Bone, pemerintah desa, serta dukungan mitra pembangunan. Berdasarkan tiga aspek yang dianalisis, kolaborasi telah membentuk mekanisme dialog, pembagian peran, pendataan, penjangkauan ATS, dan dukungan pembelajaran. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas kolaborasi masih dipengaruhi oleh kapasitas pelaporan data di tingkat desa, konsistensi koordinasi, dan kesinambungan peran ketika kepemimpinan program bergeser.

Pada aspek dialog tatap muka, Bappeda berperan penting dalam mengoordinasikan forum dan penyusunan Rencana Aksi Daerah sehingga terdapat ruang untuk menyamakan persepsi dan pembagian tugas. Pada aspek

komitmen terhadap proses, dukungan regulasi, alokasi sumber daya, penguatan kapasitas tutor PKBM, pendataan ATS, serta prinsip No One Left Behind menjadi bentuk keterlibatan para aktor. Komitmen tersebut perlu terus diperkuat melalui integrasi data, jadwal koordinasi yang konsisten, kejelasan tindak lanjut, dan mekanisme evaluasi bersama.

Pada aspek hasil, catatan program menunjukkan keterlibatan lebih dari 39.000 anak dalam upaya kembali ke pendidikan selama 2017-2023, dukungan 7.682 peserta didik PKBM pada tahun ajaran 2023-2024, serta penurunan jumlah ATS dalam data administratif yang digunakan penelitian. Nominasi Top 99 KIPP juga menunjukkan pengakuan terhadap inovasi program. Namun, capaian tersebut sebaiknya dipahami sebagai hasil program yang berjalan searah dengan perbaikan akses pendidikan, bukan sebagai bukti kausal tunggal terhadap peningkatan IPM. Ke depan, Gemar Limas perlu memperkuat validasi data ATS, kesinambungan pendampingan setelah anak kembali belajar, kapasitas desa dan PKBM, serta pelembagaan kolaborasi agar program tidak bergantung pada figur atau periode kebijakan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Purba, M., & Ekaria, E. (2023). Internal and external factors affecting drop out status in DKI Jakarta Province in 2021. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2023(1), 705-716. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2023i1.1776>
- Halid, I. S. (2022). Covid-19 pandemic and school dropout rates: Empirical evidence from Indonesia. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 6(2), 149-155. <https://doi.org/10.18196/jerss.v6i2.15316>
- Priambodo, B., Reviandani, O., & Nirawati, L. (2022). Implementation of Sanggar Kegiatan Belajar to reduce the school dropout rate in the City of Surabaya. *Jurnal Ad'ministrare*, 9(2). <https://doi.org/10.26858/ja.v9i2.36995>
- Syamsuri, S., Darlan, S., & Indrajaya, K. (2024). Implementasi kebijakan Merdeka Belajar kurikulum pendidikan nonformal pada PKBM Luthfillah Palangka Raya. *Neraca: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(2), 120-127. <https://doi.org/10.33084/neraca.v9i2.7176>
- Gea, D. P. P., Zebua, E. P., Zega, R., & Harefa, A. T. (2024). Descriptive analysis of building partnership network in the concept of management towards non-formal educational institution at PKBM Ziona in 2023/2024. *Academy of Education Journal*, 15(2), 1488-1494. <https://doi.org/10.47200/aoej.v15i2.510>
- Elieze, W. R., Rahmah, A. A. N., Himalaya, K., Putri, A. N., Achmadi, A. P., Ubaidillah, A., & Syahidah, S. A. (2024). Small area estimation for percentage of out-of-school children aged 7-17 years in Sumatera Island, 2023. *Jurnal Matematika, Statistika dan Komputasi*, 21(1). <https://doi.org/10.20956/j.v21i1.36043>
- Mawar, M., Rahman, A., Tuti, R. W. D., Handayani, N., Sahrul, M., & Purbaningrum, D. G. (2021). Collaborative governance in basic

- education services in Indonesia-Malaysia border area. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 11(2). <https://doi.org/10.26858/jiap.v11i2.26372>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Saleh, C., Hendrik, E., Zauhar, S., & Nuh, M. (2021). Collaborative governance in public administration perspective. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(6). <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.56.6.58>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Sartika, I. (2024). Collaborative governance dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 16(2), 209-233. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v16i2.4864>
- Tati, T., & Fatmawati, F. (2021). Collaborative governance dalam kebijakan pendidikan tinggi di masa pandemi. *Jurnal RASI*, 3(1). <https://doi.org/10.52496/rasi.v3i1.126>
- Islamy, L. O., & Andriani, R. (2022). Collaborative governance process of village fund management. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(1), 1-23. <https://doi.org/10.33509/jan.v28i1.1678>
- Dhini, T. M., & Bintari, A. (2023). Perspektif commitment to process pada collaborative governance penanganan kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan berbasis agama Kota Bandung Tahun 2021. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 117-137. <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.17617>
- Andini, P. F., Putri, A. P., & Purnama, N. (2024). Analysis of characteristics, morals and contributing factors in adolescent who have experienced school dropout: A portrait of education in PKBM Bakti Nusa Bogor. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 15(1). <https://doi.org/10.21831/jpka.v1i1.71964>
- Asropi, A., Daniati, A., & Ulfa, M. (2022). Collaborative governance model in Indonesian innovation startup program: The MASKIT Startup case study. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 20(1), 263-274. <https://doi.org/10.30996/dia.v20i01.6350>
- Kurniasih, D., Setyoko, P. I., Imron, M., & Wijaya, S. S. (2023). Collaborative governance in a mandated setting: Shifting collaboration in stunting interventions at local level. *Policy Design and Practice*. <https://doi.org/10.1080/25741292.2023.2212868>
- Muzayyin, A., & Handayani, D. (2023). The effect of digital literacy on the risks of

children dropping out of school during the Covid-19 pandemic. JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan, 25(2), 190-204. <https://doi.org/10.21009/jtp.v25i2.34477>

Afandi, M. N. (2022). Penguatan pengelolaan BUMDes 'Harta Sadesa' di Desa Katapang Kabupaten Bandung melalui model collaborative governance. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 19(2), 176-189. <https://doi.org/10.31113/jia.v19i2.881>

Apriliani, H., Pawitan, G., & Suratman, P. (2023). Systematic literature review: Analisis collaborative governance dalam Program Adiwiyata Sekolah. Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan, 24(2), 36-54. <https://doi.org/10.21009/plpb.v24i02.32857>

Ramadhani, N. P., Santoso, R. S., & Astuti, R. S. (2024). Collaborative governance dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. Journal of Management and Public Policy, 13(3), 116-133. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i3.44361>